



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet c.q. Deputi Bidang Administrasi.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) atas semua kegiatan yang dilakukan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran yang dapat dijadikan bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan terdapat *feed back* untuk mewujudkan optimalisasi peran Pusdatin dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Pusdatin pada tahun-tahun selanjutnya. Akhir kata, dengan upaya dimaksud, semoga Pusdatin dapat mendukung kinerja Sekretariat Kabinet untuk menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan.

Jakarta, Januari 2019
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi,

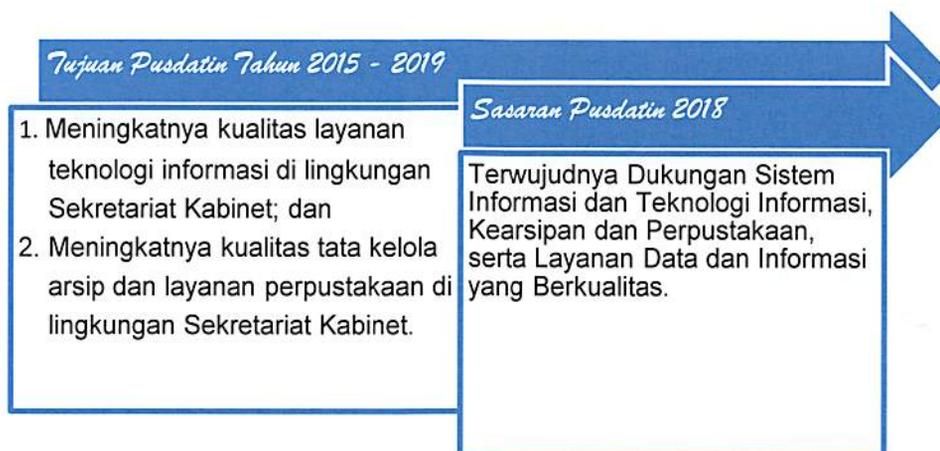


Yulyati Kristina

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasar tugas tersebut, seluruh program kerja Pusdatin diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pusdatin 2015 – 2019 (Penyempurnaan), dan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin Tahun 2018.

Dalam Rencana Strategis Pusdatin 2015 – 2019 (Penyempurnaan), Pusdatin menetapkan tujuan dan untuk pencapaiannya Pusdatin menetapkan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang rumusannya disesuaikan dengan rumusan dalam Rencana Strategis Pusdatin hasil penyempurnaan, sebagai berikut:



Mempertimbangkan Rencana Strategis Pusdatin 2015 – 2019 hasil Penyempurnaan baru dilakukan pada akhir tahun 2018, maka pengukuran pencapaian tujuan tersebut berdasar hasil pencapaian sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang

- diimplementasikan;
2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan;
 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada *website* Sekretariat Kabinet; dan
 4. Persentase kepuasan pengakses layanan *website* Sekretariat Kabinet.

Berdasar pertimbangan tersebut, untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2018 dilakukan pengukuran berdasar 4 (empat) indikator melalui pelaksanaan survei. Dari hasil survei diperoleh gambaran, dari 4 (empat) indikator untuk mengukur 1 (satu) sasaran berhasil dicapai bahkan melebihi target (capaian \geq 100% dari target kinerja) yang telah ditetapkan pada tahun ke-empat, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80%	86,67%	108,34%
2.	Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70%	92,33%	131,9%
3.	Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet	390.000 pengunduh	544.487 pengunduh	139,61%
4.	Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%	91,89%	102,1%

Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didukung dengan anggaran yang pada tahun 2018 jumlah anggaranyang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp.4.534.597.701,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) atau 90,06% dari pagu anggaran sebesar Rp.5.035.020.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pusdatin.

Capaian kinerja Pusdatin meningkat dari capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu dikelola dengan baik untuk peningkatan kinerja berikutnya, diantaranya dengan meminimalisir risiko atau mitigasi risiko, melalui penanganan sebagai berikut:

1. Mitigasi terkait kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan membuat/menyusun Kebijakan/Pedoman/SOP yang belum ada, seperti Kebijakan/Pedoman/SOP pembaruan sistem, manajemen keamanan informasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan Kearsipan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan, dan Pengembangan Bahan Perpustakaan.
2. Mitigasi terkait keamanan sistem melakukan pentest aplikasi secara berkala, ikut serta dalam diklat *secure programming* dan melaksanakan sosialisasi keamanan data dan informasi.
3. Mitigasi terkait infrastruktur dan jaringan antara lain melakukan migrasi data dari server lama ke server baru, dan melaksanakan koordinasi dengan pihak penyedia jasa sewa server.
4. Mitigasi terkait terjadinya peretasan terhadap *website* Sekretariat Kabinet dan spam akun email dinas, antara lain dengan memperbaiki *engine website* dan mengadakan *software* pengamanan data dan informasi.
5. Mitigasi terkait dengan arsip menumpuk dan rusak, diantaranya dengan mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan; melanjutkan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan melanjutkan penyerahan arsip statis ke ANRI sesuai dengan JRA.
6. Mitigasi terkait dengan buku/bahan pustaka rusak karena Perpustakaan Setkab yang berada di lantai *bassment* adalah dengan mengusulkan kembali tempat/ruang perpustakaan yang sesuai standar/memadai (aman dari bahaya banjir dan kebakaran dan pemasangan lampu dengan pencahayaan yang cukup).
7. Mitigasi terkait dengan kurang optimalnya *performance* SDM Pusdatin, dilakukan dengan mengusulkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan Pusdatin, seperti diikuti sertakan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan *benchmark* yang terkait dengan peningkatan kompetensi, motivasi, dan nilai/budaya kerja sesuai kebutuhan Pusdatin dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dengan pengelolaan yang baik atas kendala yang ada melalui rencana penanganan risiko, Pusdatin berharap dapat meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan manajemen kabinet.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Potensi dan Permasalahan	5
C. Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis (Hasil Penyempurnaan) 2015 - 2019	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
BAB III Capaian Kinerja	17
A. Capaian Kinerja	18
B. Evaluasi dan analisa capaian kinerja	19
C. Realisasi Anggaran	43
BAB IV Penutup	49
Lampiran:	
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Pusdatin Tahun 2018	
Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Pusdatin Tahun 2018	
Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran Pusdatin Tahun 2018	
Lampiran 4: Kuesioner Survei Kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi Informasi yang diimplementasikan	
Lampiran 5: Kuesioner Survei Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika lingkungan strategis yang sedemikian cepat menuntut kemampuan organisasi maupun unit kerja untuk berhasil mencapai cita-cita yang diinginkan, tidak terkecuali Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit kerja setingkat eselon II di Sekretariat Kabinet. Pusdatin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi, dalam pelaksanaan tugas memiliki peran strategis mendukung Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan manajemen kabinet, yakni dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, pengelolaan kearsipan, dan layanan perpustakaan. Dengan peran strategis tersebut, Pusdatin diharapkan dan diarahkan mempunyai kemampuan mengantisipasi dinamika perkembangan, perubahan dan tantangan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuannya, melalui penetapan perencanaan strategis, yakni Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan).

Berdasar Renstra Pusdatin 2015 – 2019 (Penyempurnaan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Pusdatin telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018 untuk pencapaian kinerja yang dapat mendukung dan memberi kontribusi pada pencapaian sasaran dan program Sekretariat Kabinet. Guna memberikan gambaran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sepanjang tahun 2018, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pusdatin menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusdatin Tahun 2018. Penyusunan LKj Pusdatin Tahun 2019 berdasar Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Sistematisasi Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

LKj Pusdatin Tahun 2019 ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, dimaksudkan juga untuk memperbaiki kinerja dengan memberi ruang bagi *stakeholders* dalam memberikan saran dan masukan guna Pusdatin dapat meningkatkan kinerja secara berkelanjutan yang pada gilirannya Pusdatin dapat

meningkatkan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan manajemen kabinet.

1. Kedudukan

Pusdatin, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, dipimpin oleh Kepala Pusat, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.

2. Tugas

Pusdatin bertugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

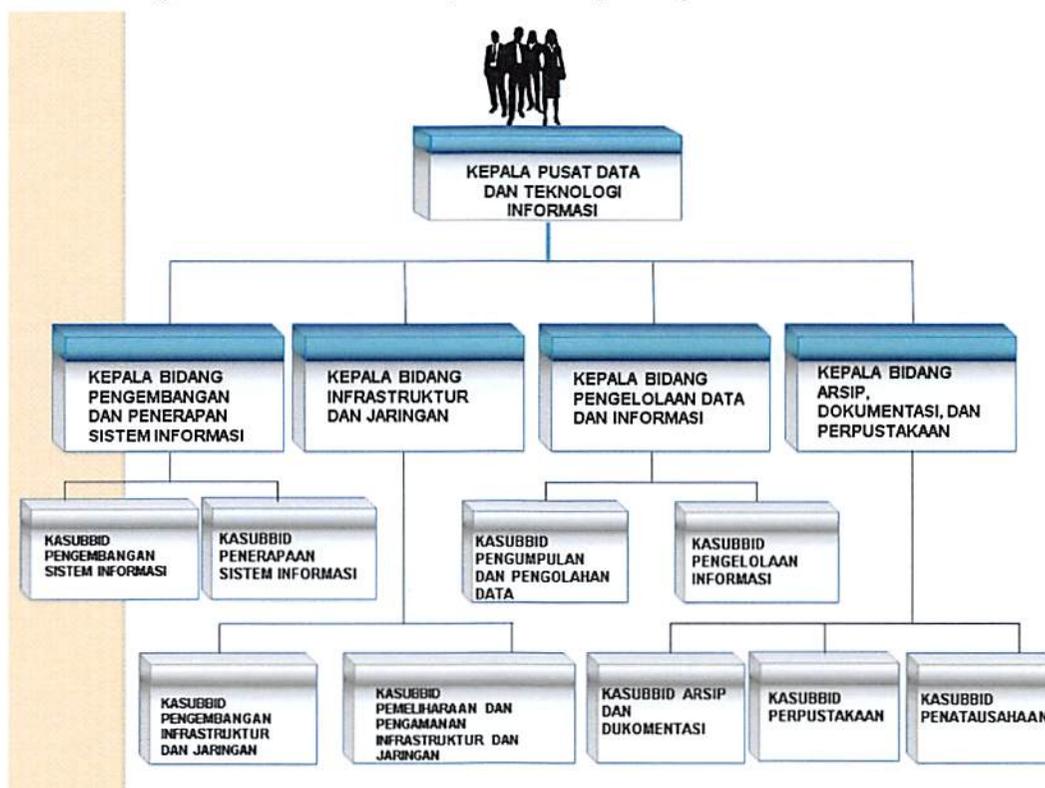
- a. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
- b. Pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
- d. Pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. Penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Struktur Organisasi Pusdatin

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin membawahi 4 (empat) bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b. Bidang Infrastruktur dan Jaringan, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet, dan
- d. Bidang Arsip, Dokumentasi, dan Perpustakaan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penatausahaan di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Struktur organisasi Pusdatin dapat dilihat pada gambar berikut:



B. Potensi dan Permasalahan Pusdatin

1. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi Pusdatin

Pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan informasi dan dokumen/arsip sangat bergantung pada 4 (empat) komponen dasar yaitu organisasi dan tata kelola, perangkat keras dan infrastruktur jaringan, perangkat lunak (aplikasi) dan sistem informasi serta sumber daya manusia. Dengan demikian dalam mendukung Sekretariat Kabinet pada penyelenggaraan manajemen cabinet melalui dukungan TIK tentunya Pusdatin menghadapi isu-isu strategis terkait 4 (empat) komponen dasar tersebut.

Dari sisi organisasi dan tata kelola, Pusdatin menghadapi upaya untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam upaya *debottlenecking* dan *debirokratisasi* serta dinamika pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas atau Pertemuan yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari sisi ini, Pusdatin perlu menyikapi isu strategis yakni membangun/mengembangkan TIK secara bertahap yakni langkah awal membangun/mengembangkan TIK lintas kementerian koordinator, selanjutnya berdasar kebutuhan dan dukungan sumber daya membangun/mengembangkan TIK lintas kementerian/lembaga/instansi pemerintah, beserta kebijakan dalam pengelolaannya.

Dari sisi perangkat keras dan infrastruktur jaringan, Pusdatin menghadapi isu strategis yakni jaringan yang tidak hanya dapat diakses secara intranet namun dapat diakses secara internet secara aman dan terjaga kerahasiaannya mengingat data dan informasi yang dikelola oleh Pusdatin terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas atau Rapat yang dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden, rekomendasi kebijakan pemerintah, dan arahan-arahan Presiden yang tidak seluruhnya atau belum saatnya disampaikan ke Publik. Dalam bentuk aplikasi atau media penyampaian persiapan penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas, Pusdatin menghadapi *e-mail* dan komunikasi yang harus terjaga keamanan dan kerahasiaannya (*secure e-mail* dan *secure chat*) dan aplikasi untuk pengawasan dan pemantauan tindak lanjut arahan Presiden maupun aplikasi (*website*) yang dapat menginformasikan arahan dan kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden.

Dari Sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pusdatin menghadapi isu-isu strategis terkait berpacunya kompetensi SDM dengan perkembangan TIK yang harus diikuti melalui *workshop*, seminar dan pelatihan-pelatihan yang bersertifikat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menghadapi isu-isu strategis tersebut, Pusdatin perlu mengetahui potensi kekuatan dan kelemahan. Selain itu perlu mengetahui peluang dan ancaman yang disikapi sebagai tantangan dalam pengembangan dan implementasi TIK dalam pengelolaan informasi dan dokumen/arsip/bahan pustaka, informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas atau Pertemuan yang dipimpin Presiden atau Wakil Presiden, serta rekomendasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan tindak lanjut arahan Presiden.

Berdasar SWOT (*Strengths, Weakneses, Oportunities, dan Threats*) atas lingkungan strategis, Pusdatin dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar pengembangan dan penerapan TIK dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

2. Analisis SWOT (*Strengths, Weakneses, Oportunities, dan Threats*)

Guna mengetahui potensi kekuatan dan peluang, serta permasalahan dan tantangan, Pusdatin mengupayakan strategi yang perlu dilakukan berdasar identifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakneses*), Peluang (*Oportunities*), dan tantangan atau ancaman (*Threats*). Secara garis besar beberapa potensi kekuatan dan kendala serta peluang dan tantangan yang dapat diidentifikasi dari lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Analisis internal bertujuan untuk mengetahui potensi kekuatan maupun kelemahan atau permasalahan sehingga Pusdatin dapat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Berdasar analisis lingkungan internal, dapat diketahui potensi kekuatan dan kelemahan Pusdatin:

1) Kekuatan Dasar Pusdatin

Kekuatan dasar Pusdatin yang signifikan dan berpengaruh dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran sebagai berikut:

- a) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan berbasis TIK yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, yang mencerminkan suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi. Komitmen ini dapat dilihat dari visi dan misi organisasi yang jelas yang dijadikan acuan dalam perumusan visi dan misi Pusdatin. Selain itu, komitmen Pimpinan dapat dilihat dari arahan dan kebijakan dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen

kabinet dengan penerapan *e-government* sesuai amanat reformasi birokrasi.

- b) Peran strategis Pusdatin dalam mendukung Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet yang terlihat dari tugas dan fungsi Pusdatin, yaitu pengelolaan informasi dan dokumen/arsip/bahan pustaka berbasis TIK. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin dalam menyelenggarakan sistem informasi berbasis TIK untuk pengelolaan informasi/dokumen/arsip/bahan pustaka, diantaranya melalui *website* www.setkab.go.id maupun jaringan intranet di lingkungan kantor Lembaga Kepresidenan.
 - c) Sumber Daya Manusia yang menjadi tenaga pelaksana di Pusdatin sebagian besar berpendidikan Strata 1, baik dalam bidang administrasi dan sistem informasi. Hal ini merupakan kekuatan pendorong untuk menjadikan Pusdatin sebagai unit kerja yang berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang TI. Selain itu SDM yang ada dapat ditingkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional baik yang ditawarkan oleh unit kerja terkait maupun yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan SDM Pusdatin.
- 2) Kelemahan Unit Kerja
- a) Sistem Informasi yang berbasis TIK untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan unit kerja, belum sepenuhnya dikembangkan, yang dapat dilihat dari *grand design* yang ada belum sesuai tuntutan kebutuhan tugas dan fungsi hasil restrukturisasi, serta sarana dan prasarana belum terpenuhi secara keseluruhan.
 - b) Standar kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan tugas belum diterapkan secara menyeluruh dan pendayagunaan SDM yang ada belum optimal.
 - c) Kebijakan dan tata kelola berupa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ada belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu, bisnis proses dan pedoman terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem informasi berbasis TIK belum terbentuk secara memadai.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu peluang dan ancaman atau tantangan, sebagai berikut:

1) Peluang Unit Kerja

- a) Komitmen nasional dan dukungan kebijakan diantaranya terkait tata pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan keterbukaan informasi publik, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perumusan rencana strategis dan pelaksanaan dalam memperkuat pemberian layanan terbaik bagi *stakeholders* Sekretariat Kabinet.
- b) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menghantar dunia maya menjadi nyata di hadapan manusia. Dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dan dapat dijelajahi dengan hanya duduk di hadapan layar komputer. Keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis dan waktu sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang. Segala aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, hiburan, pemasaran, promosi, dan komunikasi kini berjalan dengan cepat dan mudah. Pusdatin harus mengikutinya dengan cermat supaya jangan sampai tertinggal teknologi yang digunakan yang dapat mengakibatkan layanan data dan informasi kebijakan pemerintah tidak menarik lagi dan publik menjadi tidak ingin mengakses informasi dimaksud.
- c) Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik dan informasi.

2) Ancaman atau tantangan Unit Kerja

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi pemerintah.
- b) Krisis keuangan global berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi yang mempengaruhi daya beli Pemerintah difokuskan pada kegiatan dan penyediaan barang/jasa yang bersentuhan langsung ke

masyarakat. Dengan kondisi tersebut, walaupun perangkat teknologi masa kini menuju pada tren skala ekonomi yang lebih terjangkau namun tetap dibutuhkan biaya untuk mengakses internet yang jika tidak dioptimalisasi dapat menjadi penghambat pencapaian Visi dan Misi Pusdatin terutama penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah secara cepat dan akurat melalui www.setkab.go.id.

- c) Mitra kerja (vendor) merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi sumber masalah atau kendala dalam pengembangan TIK, baik dalam hal penentuan vendor yang dipengaruhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun dukungan purna jual yang diberikan vendor tidak berjalan dengan baik.

3. Potensi dan Strategi Pusdatin

Berdasar analisis SWOT di atas, Pusdatin merumuskan strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan ancaman atau tantangan yang dihadapi. Berdasarkan strategi tersebut Pusdatin dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui *capacity building* yang dapat meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* dalam pengelolaan pembangunan/pengembangan sistem informasi berbasis TIK; pengusulan dan penetapan jabatan fungsional terkait pengelolaan pembangunan/pengembangan sistem informasi, seperti jabatan fungsional Pranata Komputer; arsiparis; dan pustakawan, dan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan Pusdatin dalam pembangunan/pengembangan sistem informasi berbasis TIK, serta dalam pengelolaan kearsipan dan layanan perpustakaan;
- b. Melaksanakan pembangunan/pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis TIK sebagai upaya penerapan *e-government* sesuai amanat reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
- c. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan unit kerja/satuan organisasi baik internal maupun eksternal.

C. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 mengenai Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet yang merupakan tindak lanjut ketentuan Permen PANRB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pusdatin Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Pusdatin serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Pusdatin;
2. Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini mencakup 2 (dua) sub bab yang menggambarkan perencanaan dalam Renstra Pusdatin 2015 – 2019 (Penyempurnaan), Rencana Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 terkait uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusdatin beserta target yang diperjanjikan;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini menjelaskan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pusdatin tahun 2018;
4. Bab IV Penutup. Dalam bab ini menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pusdatin dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk peningkatan kinerja Pusdatin.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pusdatin 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin Tahun 2015 - 2019 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019 guna dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan misi dan agenda prioritas yang telah ditetapkan. Renstra Pusdatin Tahun 2015 – 2019, selain dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Renstra periode 2015-2019 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, juga dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi jajaran pimpinan dan pegawai Pusdatin dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Renstra ini juga dapat dijadikan tolok ukur pencapaian program dan kegiatan yang sesuai rencana dalam sisa waktu yang ada dari periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

Renstra Pusdatin 2015 - 2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang penyusunannya berdasarkan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan hasil kajian dinamika lingkungan strategis dengan menggunakan metode SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Renstra Pusdatin 2015 – 2019 mengalami penyempurnaan pada akhir tahun 2018 (bulan September 2019) dengan pertimbangan dinamika perubahan lingkungan strategis Pusdatin, dan tuntutan ketentuan dan saran yang ada hasil dari evaluasi internal yang dilakukan unit pengawasan (inspektorat) atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyempurnaan, diantaranya dilakukan dengan perubahan indikator tujuan guna dapat mengukur pencapaian tujuan Pusdatin, dan dilakukan penyempurnaan lainnya terkait rumusan sasaran yang dapat menggambarkan *outcome*, metode penghitungan untuk pengukuran kinerja, dan penetapan target tahunan. Namun demikian, penyempurnaan yang dilakukan belum dapat komprehensif mengingat sisa waktu dari periode Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan), dan konsekuensi yang harus dilakukan yakni penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen lain terkait, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Gambaran penyempurnaan Renstra Pusdatin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Penyempurnaan Renstra Pusdatin

Kriteria	Renstra Pusdatin 2015 – 2019 (Sebelum Penyempurnaan)	Renstra Pusdatin 2015 – 2019 (Sesudah Pempurnaan)
Visi	Pusdatin yang Profesional dan andal dalam mendukung Sekretariat Kabinet menyelenggarakan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan	Menjadi Pusdatin yang profesional dan andal dalam menyelenggarakan layanan teknologi informasi guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan Manajemen Kabinet
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai 2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menjalankan <i>e-gov</i> 3. Mengembangkan sistem informasi yang menunjang <i>e-gov</i> 4. Pengelolaan portal Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) 5. Pengelolaan Arsip, Dokumen dan Perpustakaan 	Meningkatkan layanan data dan informasi serta tata kelola arsip dan perpustakaan yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan <i>e-gov</i> di lingkungan Sekretariat Kabinet
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2. Meningkatnya kualitas layanan arsip dan perpustakaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet 2. Meningkatnya kualitas tata kelola arsip dan layanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Indikator Tujuan	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepuasan penggunaterhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan; 2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan; 3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet; 4. Persentase kepuasan pengakses layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet; 5. Persentase pelestarian arsip/dokumen.
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2. Terwujudnya peningkatan layanan arsip dan kepustakaan dengan baik. 	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas
Indikator Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengakses situs Sekretariat Kabinet 2. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan situs Sekretariat Kabinet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan; 2. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet; 3. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet; 4. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan 5. Persentase pelestarian arsip/dokumen

Dalam Renstra Pusdatin 2015—2019 tersebut, telah ditetapkan visi dan misi organisasi yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi Pusdatin sejak awal penyusunan Renstra telah mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Penyempurnaan Renstra sebagaimana tabel di atas, dilakukan dengan beberapa pertimbangan namun penyempurnaan belum komprehensif sebagaimana telah disebut di muka.

Sasaran Strategis “Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas” dilakukan dalam upaya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, antara lain dalam:

1. Mengawasi kinerja kementerian/lembaga guna memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah; dan
2. Menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Pusdatin melakukan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki, yaitu melalui:

1. Menyelenggarakan, mengembangkan, memelihara, dan mengamankan Infrastruktur dan Jaringan agar dapat berfungsi dengan baik;
2. Membangun/mengembangkan sistem manajemen informasi dan memastikan efektifitas penerapan dan pemanfaatannya;
3. Mengelola, menyebarluaskan, dan memberi dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet;
4. Memberi dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Melalui program dan kegiatan tersebut, untuk mewujudkan sasaran strategis Pusdatin, pada intinya Pusdatin melaksanakan pembangunan/pengembangan sistem dan teknologi informasi, data dan informasi, dan bahan pustaka dalam mendukung penyelenggaraan persidangan kabinet, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan dan tindak lanjut dari seluruh arah dan kebijakan Presiden/Wakil Presiden, dan dalam mendukung analisis untuk pemberian rekomendasi kepada Presiden/Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan; dan dalam mendukung pelaporan dan penyebaran hasil-hasil penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas/rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden, dan hasil-hasil pengelolaan operasional kabinet, serta kegiatan Sekretaris Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran strategis dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan pelestarian arsip/dokumen vital Sekretariat Kabinet yang mempunyai nilai sejarah terkait penyelenggaraan kabinet dan pemerintahan melalui

penyerahan arsip/dokumen tersebut kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selain itu, untuk mendukung mewujudkan sasaran strategis, Pusdatin melaksanakan program dan kegiatan penatausahaan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK tahun 2018 disesuaikan dengan Renstra Pusdatin Tahun 2015-2019, IKU dan DIPA Pusdatin tahun 2018. Dengan adanya penyempurnaan Renstra Pusdatin 2015-2019, maka rumusan sasaran strategis dalam PK Pusdatin tahun 2018 disesuaikan dengan rumusan sasaran strategis dalam Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan). Sedangkan untuk indikator kinerja masih berdasar yang ditetapkan dalam PK Pusdatin tahun 2018 dengan pertimbangan penyempurnaan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan) baru dilakukan di akhir periode 2018 sehingga indikator tambahan, yaitu "Persentase pelestarian arsip/dokumen" belum dapat dijadikan dasar untuk mengukur pencapaian sasaran Pusdatin. Gambaran sasaran strategis, indikator kinerja dan target, serta anggaran Pusdatin tahun 2018, sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Anggaran Tahun 2018	Anggaran Tahun 2018 Setelah Optimalisasi
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan)				
Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80%	Rp.782.597.3000	Rp.4.469.293.000,-
		2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70%	Rp.129.890.000,-	Rp.129.890.000,-
		3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada website	390.000 Pengunduh	Rp.298.191.000,-	Rp.298.191.000,-
		4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet;	90%	Rp.137.646.000,-	Rp.137.646.000,-

Dari tabel tersebut di muka, tergambar bahwa Pagu Awal Pusdatin Tahun 2018 sebesar Rp.8.391.700.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun dengan adanya Optimalisasi Anggaran guna memenuhi kebutuhan peningkatan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat Kabinet RI maka Pagu Pusdatin Tahun 2018 hasil revisi (penyesuaian) menjadi sebesar Rp.5.035.020.000,- (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Pul uh Ribu Rupiah).



BAB III

CAPAIAN KINERJA

BAB III CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) tergambar dalam laporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pusdatin tahun 2018 sudah tercapai. Sebagaimana telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, untuk pengukuran kinerja dilakukan berdasar indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK Pusdatin Tahun 2018 walaupun rumusan sasaran menyesuaikan dengan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Pusdatin Tahun 2015 -2019 (Penyempurnaan). Dari 4 (empat) indikator untuk mengukur 1 (satu) sasaran, seluruh indikator tersebut dinyatakan “berhasil” mencapai bahkan melebihi target (capaiannya > 100%) yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan)				
Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80%	86,67%	108,34%
		2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70%	92,33%	131,9%
		3. Jumlah pengunjung data dan informasi pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet	390.000 pengunjung	544.487 pengunjung	139,61%
		4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%	91,89%	102,1%

B. Evaluasi dan analisa capaian kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja guna mewujudkan sasaran Pusdatin, dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Pusdatin

Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas.

Rumusan sasaran Pusdatin tersebut merupakan rumusan sasaran yang disesuaikan dengan rumusan sasaran yang dimuat dalam Renstra Pusdatin Tahun 2015–2019 sebagai hasil penyesuaian dengan tuntutan ketentuan dan saran hasil evaluasi internal yang dilakukan unit pengawasan (Inspektorat) atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Guna mewujudkan Sasaran Pusdatin, diperlukan kebijakan dan strategi yang mengacu dan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet 2015-2019 yang meliputi penguatan terhadap 5 (lima) aspek, yaitu aspek peningkatan penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; aspek kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional dan berkualitas; aspek kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif; aspek sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait; dan aspek peningkatan kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam mendukung pengelolaan manajemen kabinet.

Arah kebijakan dan strategi Pusdatin difokuskan pada aspek “Peningkatan penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi”. Meskipun demikian, fokus tersebut tidak berdiri sendiri dalam pelaksanaannya, tetapi berhubungan erat dengan arah kebijakan dan strategi dari 4 (empat) aspek lainnya. Adapun strategi Pusdatin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai yang dilakukan dengan pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur dan akses komunikasi data yang andal; dan Kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta khususnya dalam penyediaan akses komunikasi data yang aman.
2. Pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan yang mendukung penerapan *e-government*, diantaranya melalui pembuatan perangkat lunak dan basis data (*database*) dan/atau pembangunan/pengembangan sistem dan

teknologi informasi untuk menukung kinerja *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan perundang-undangan; pengadaan perangkat lunak berlisensi; dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait dan/atau swasta dalam pembangunan/pengembangan sistem dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan *e-government* di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Pembangunan basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mendukung penerapan *e-government*, dengan melaksanakan pembuatan basis data dan basis pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung penerapan *e-government*.
4. Pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola penerapan *e-government*, dengan mengikutsertakan SDM dalam *capacity building* terkait dengan pemanfaatan dan pengoperasian sistem teknologi informasi dan komunikasi.
5. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan untuk mendukung penerapan *e-government*.
6. Pelestarian, pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen dan bahan pustaka.

Arah kebijakan dan strategi Pusdatin tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Pusdatin. Dari kegiatan yang telah ditargetkan setiap tahunnya dalam Renstra Pusdatin Tahun 2015–2019 (Penyempurnaan) terdapat kegiatan yang selesai dilaksanakan, kegiatan yang *on going process* karena berkelanjutan, dan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena perlu ada kegiatan lain yang dilaksanakan terlebih dahulu, serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan pada tahun 2018 ini karena tuntutan kebutuhan.

Berikut ini gambaran perbandingan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2018 untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pusdatin sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Pusdatin Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak :

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
Aplikasi Keuangan				
1.	Pengadaan SISKAs	direncanakan	tercapai	Telah di implementasikan SISKAs 2018
Aplikasi Reformasi Birokrasi				
1.	Pengembangan SIKT	Tidak direncanakan	dilaksanakan	Pengembangan SIKT dilaksanakan

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
				guna memenuhi <i>Area of Improvement</i> (Aol) hasil evaluasi RB Kemen PANRB
2.	Pengembangan SIPT	Direncanakan	tercapai	Telah di implementasikan SIPT versi 2.0
3.	Pengembangan Kerja Pegawai (SKPonline)	Tidak direncanakan	dilaksanakan	Dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan Biro AKRB dalam melengkapi laporan sasaran kerja pegawai
Aplikasi Aset				
1.	Pengembangan Manajemen Aset	direncanakan	Tidak tercapai	Pengembangan Management Aset belum dilaksanakan karena memerlukan pengkajian lebih seksama, terkait barang milik negara yang akan dicatat
Manajemen Personalia				
1.	Pengembangan Sistem Informasi Penggajian (<i>payroll</i>)	Tidak direncanakan	dilaksanakan	Dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan Biro SDMOT dan meng <i>upgrade</i> sistem informasi yang lama (<i>existing</i>)
Aplikasi Utama				
1.	Pengembangan SITAP	Tidak direncanakan	ada	Pengembangann SITAP dilaksanakan guna memenuhi amanat Inpres 7 Tahun 2017 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018
2.	Pembangunan Web Jabatan Fungsional Penerjemah (<i>Web JFP</i>)	Tidak direncanakan	dilaksanakan	Dilaksanakan guna memenuhi Permen PANRB Nomor 49 Tahun 2014, sebagaimana telah

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
				diubah dengan Permen PANRB Nomor 49 Tahun 2014 tentang JFP (Setkab sebagai Instansi Pembina JFP)
Layanan				
1.	Pengembangan EIS	direncanakan	Tidak tercapai	Pengembangan EIS belum dilaksanakan karena membutuhkan kematangan (<i>maturity</i>) aplikasi-aplikasi pendukung (<i>existing</i>) dan integrasi sistem
2.	Integrasi Sistem	direncanakan	Tidak tercapai	Integrasi sistem belum dilaksanakan karena membutuhkan kematangan (<i>maturity</i>) aplikasi-aplikasi pendukung (<i>existing</i>)
3.	<i>e-Mail</i>	direncanakan	tercapai	Telah dilaksanakan pengadaan, instalasi, dan konfigurasi 50 <i>mailboxes</i> email Zimbra <i>NE Standard Edition</i> , serta pemeliharaan email
4.	Internet	Direncanakan	tercapai	Keberlangsungan Layanan internet di Sekretariat Kabinet di tahun 2018 direncanakan 90% dan hal itu telah tercapai dengan capaian sebesar 99.9%
5.	Keamanan Jaringan	Direncanakan	tercapai	- telah diimplementasikan <i>Bandwidth Management</i> guna mengatur dan

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
				<p>mengelola penggunaan <i>bandwidth</i> di jaringan lingkungan Setkab sehingga dapat lebih optimal dan performa jaringan menjadi lebih terjamin (<i>secure</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan <i>protocol</i> keamanan (<i>https</i>) website setkab, SIPPU, SISKAB, dan SIPPIL; - telah dilaksanakan <i>Self Assesment</i> Indeks KAMI oleh BSSN
6.	<i>Wifi</i>	Direncanakan	tercapai	<p>Untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna <i>wifi</i> di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet tahun 2018 telah dilakukan pengadaan <i>wifi</i> pengganti sebanyak 15 unit dan telah dipasang untuk menggantikan perangkat <i>wifi</i> yang lama</p>
7.	<i>Storage</i>	Direncanakan	Tercapai	<p>Tercapai dengan diadakannya Server HCI yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan performa kerja yang lebih baik untuk digunakan menggantikan server-server lama sesuai rencana.</p>

2. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
1.	<i>Backup data storage</i>	direncanakan	tercapai	Berhasil dilakukan antara lain <i>back up</i> terhadap seluruh data-data foto dan video di galery Asdep Humas dengan memindahkannya ke server yang baru dengan kapasitas lebih besar dan <i>mbackupnya ke cloud storage</i> sesuai rencana.

3. Tata Kelola IT :

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
1.	Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan dan Standar Tata Kelola Sistem Informasi berbasis TIK	direncanakan	<i>on progress</i>	Rancangan draft sudah diajukan menunggu persetujuan dari Deputi Administrasi
2.	Kajian Management Risiko TIK	direncanakan	tercapai	Dengan disusunnya peta risiko dan rencana penanganan risiko Pusdatin
3.	Pelatihan & Sertifikasi Tahunan Pengelola dan Pengguna TIK	direncanakan	tercapai	Dengan diikutsertakannya pegawai Pusdatin dalam diklat
4.	Survey kepuasan pengguna TIK di Setkab	direncanakan	tercapai	Dilakukan survei Kepuasan Pengguna Sistem Informasi dengan membagikan kuisisioner dalam bentuk <i>hardcopy</i> kepada setiap responden melalui memorandum Kepala Pusdatin kepada masing-masing kepala unit kerja dengan Nomor M.14/Pusdatin/01/2019 Tanggal 7 Januari 2019. Hasil survei 86.667%, dengan demikian Pusdatin telah berhasil mencapai bahkan melewati target yang telah ditentukan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 80%.

4. Pengelolaan Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan :

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
1.	Reviu dan penyempurnaan Pedoman Klasifikasi Arsip	direncanakan	<i>on progress</i>	Sudah dilaksanakan reviu dan pembahasan bersama wakil dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan Narasumber dari ANRI, dengan hasil Narasumber ANRI menyarankan untuk pembuatan/penyusunan/ penyempurnaan pedomanmenunggu SOTK Sekretariat Kabinet yang baru
2.	Reviu dan penyempurnaan JRA	direncanakan	<i>on progress</i>	S.D.A
3.	Pembahasan penyusunan rancangan sistem keamanan akses arsip/dokumen	direncanakan	<i>on progress</i>	S.D.A
4.	Verifikasi arsip in-aktif (Deputi Polhukam)	direncanakan	tercapai	Sudah dilaksanakan verifikasi dan disimpan di ruang penyimpanan arsip (<i>record center</i>)
5.	Verifikasi arsip statis kedeputian DKK	direncanakan	tercapai	Sudah dilaksanakan verifikasi dan siap di serahkan ke ANRI
6.	Penetapan arsip statis yang akan diserahkan ke ANRI sesuai permohonan unit kerja/unit pengolah	direncanakan	tercapai	Sudah ditetapkan oleh SekretarisKabinet dengan Kepseskab Nomor 77 Tahun 2018 (Penetapan penyerahan Arsip Statis, sejumlah 277 Arsip Statis Transkripsi);Kepseskab Nomor 19 Tahun 2019 (Penetapan penyerahan Arsip Statis, sejumlah 277 Arsip Statis Risalah); dan Kepseskab Nomor 20 Tahun 2019 (Penetapan penyerahan Arsip Statis, sejumlah 1.130 Arsip Statis Rekaman Kaset).

No.	Kegiatan	Target RENSTRA Tahun 2018	Capaian Tahun 2018	Keterangan
7.	Penyerahan arsip statis ke ANRI sesuai permohonan unit kerja/unit pengolah	direncanakan	<i>On progress</i>	Pelaksanaan penyerahan Arsip Statis Hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas tahun 1997 – 2014 sudah melalui prosedur penyerahan Arsip Statis sebagaimana uraian di atas, namun penyerahan secara simbolis masih menunggu kesesuaian waktu Pimpinan ANRI dan Sekretariat Kabinet.
8.	Pembahasan persiapan penyempurnaan pedoman/SOP/petunjuk pelaksanaan pengelolaan perpustakaan	direncanakan	tercapai	Sudah dilaksanakan koordinasi internal membahas persiapan penyempurnaan pedoman/SOP/petunjuk pelaksanaan pengelolaan perpustakaan
9.	Pembahasan dan penyusunan kebijakan dan tata kelola kearsipan, pendokumentasian, dan perpustakaan	direncanakan	<i>on progress</i>	Masih dalam tahap pembahasan
10.	Penyelenggaraan seminar (bedah buku)	Tidak direncanakan	tercapai	Sosialisasi Studi Pustaka telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018 dengan judul buku "HIQ: <i>Holistic Investment Quotient</i> "

Bertolak dari kegiatan-kegiatan tersebut, Pusdatin berupaya mewujudkan tercapainya sasaran Pusdatin pada tahun 2018, yakni "Terwujudnya dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas". Tercapainya Sasaran Pusdatin tersebut tercermin pada indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang diimplementasikan

Guna mengetahui capaian sasaran Pusdatin pada tahun 2018, Pusdatin telah melakukan survei melalui kuisisioner yang disebar kepada pengguna layanan sistem dan teknologi informasi yang diberikan oleh Pusdatin. Survei ini dilakukan, diantaranya untuk mengetahui kepuasan pengguna layanan

Pusdatin terkait sistem dan teknologi informasi yang telah diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Survei dilakukan melalui pengisian kuisisioner oleh para responden yaitu para pengguna layanan. Namun demikian tidak seluruh pengguna layanan dilibatkan untuk menjadi responden. Penentuan jumlah responden sebagai sampel menggunakan metode Malhotra agar survei yang dilakukan tetap memberikan hasil yang valid. Berdasarkan metode Malhotra, sampel yang diambil setidaknya berjumlah 5 (lima) kali dari jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner.

Dalam survei ini Pusdatin memberikan 14 pertanyaan dalam bentuk pernyataan yang ditentukan dengan menggunakan teori HOT-FIT (*Human Organization Technology-FIT*). Kategori pertanyaan/pernyataan yang disusun adalah:

- a. *User Experience*;
- b. Keamanan Aplikasi; dan
- c. Data dan Informasi.

Skala penilaian yang digunakan adalah skala Likert, dengan 4 (empat) skala yang bertujuan untuk menghindari netralitas dari responden, yaitu sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS);
- b. Setuju (S);
- c. Tidak Setuju (TS);
- d. Sangat Tidak Setuju (STS).

Berdasarkan metode dan teori tersebut di atas, maka jumlah minimum sampel yang harus dipenuhi berdasarkan metode Malhotra adalah 70 orang responden (sampel minimum = 14×5). Namun demikian Pusdatin menentukan jumlah sampel sebanyak 125 responden, dengan asumsi bahwa jumlah ini telah memenuhi ketentuan metode Malhotra dan juga mewakili setidaknya 25% atau seperempat populasi pengguna sistem dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang berjumlah lebih kurang 500 orang. Sampel yang ditentukan disebar secara merata pada setiap unit kerja (eselon II) yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet yaitu sejumlah 25 unit kerja (tidak termasuk Pusdatin). Dengan jumlah tersebut, masing-masing unit kerja diberikan sejumlah 5 kuisisioner.

Survei dilaksanakan melalui penyebaran kuisisioner kepada para responden pada tanggal 7 Januari 2019 dan selesai dikumpulkan serta diolah

pada tanggal 11 Januari 2019. Adapun hasil survei kepuasan pengguna sistem dan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

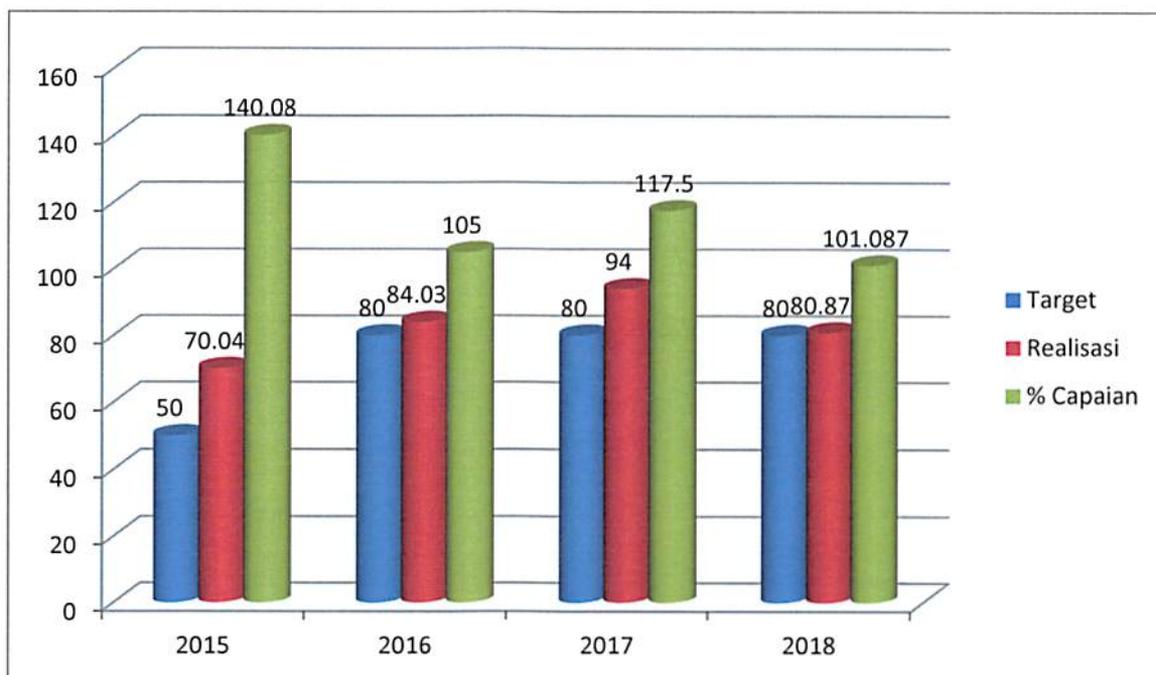
KATEGORI	JUMLAH
Sangat Setuju (SS)	234
Setuju (S)	1086
Tidak Setuju (TS)	191
Sangat Tidak Setuju (STS)	12
Total Responden	109 Orang

Dari hasil survei yang diperoleh pada saat akhir waktu pengumpulan hanya terkumpul 109 data responden, sementara 16 kuisioner sisanya tidak dikembalikan oleh responden. Dari hasil tersebut, diperoleh data yang dapat dimasukkan ke dalam metode perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kepuasan} &= \frac{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S}}{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S} + \text{TS} + \text{STS}} \times 100\% \\ &= \frac{234 + 1086}{234 + 1086 + 191 + 12} \times 100\% \\ &= 86.667\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh hasil 86.667%, yang memiliki arti bahwa 86.667% pengguna sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Pusdatin. Dengan demikian Pusdatin telah berhasil mencapai bahkan melewati target yang telah ditentukan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 80%.

Grafik dan tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan hasil pelaksanaan survei "Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan" dari tahun 2015 sampai dengan 2018.



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	2015	50%	70,04%	140,08%
	2016	80%	84,03%	105%
	2017	80%	94%	117,50%
	2018	80%	86.667%	108,34%

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir, persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan capaiannya di atas target yang telah ditetapkan sebesar 80%, dengan capaian tertinggi di tahun 2017 sebesar 94%, dan menurun di tahun 2018 dengan capaian sebesar 86,667% (turun sebesar 7,333%). Penurunan capaian ini disebabkan oleh perbedaan metodologi survei yang digunakan, jumlah dan kriteria pegawai yang menjadi responden, dan ragam aplikasi yang menjadi objek survei.

Pada tahun 2017, survei dilaksanakan dengan menyebar 39 (tiga puluh sembilan) kuesioner kepada responden yang menduduki jabatan pengelola

keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan) sebagai responden untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap 1 (satu) layanan sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

Sedangkan tahun 2018, survei dilaksanakan dengan menyebar 125 (seratus dua puluh lima) kuesioner kepada responden di lingkungan Sekretariat Kabinet (25% populasi dari jumlah populasi sebanyak kurang lebih 500 pegawai) dan disebar merata di seluruh unit kerja (eselon II) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap 4 (empat) layanan sistem informasi dan teknologi informasi, yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), dan Sasaran Kerja Pegawai *Online* (SKP *Online*).

2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan

Pusdatin dalam menyelenggarakan program dan kegiatan terkait penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet menyediakan bahan pustaka seperti buku, majalah, surat kabar dan jurnal yang diarahkan untuk mendukung kinerja Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajemen Kabinet.

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan tersebut, Pusdatin memberikan layanan bahan pustaka baik untuk dibaca di tempat (di Perpustakaan) dan/atau dipinjam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam periode ini, Pusdatin baru dapat memberikan layanan bahan pustaka yang sifatnya umum. Namun demikian secara bertahap Pusdatin berupaya untuk memberikan layanan bahan pustaka yang sifatnya khusus (*repository*) yakni kekayaan yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet yang dapat digunakan sebagai media mengangkat citra, misal artikel ilmiah Sekretariat Kabinet.

Pelayanan perpustakaan sebagai wadah bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memerlukan data/informasi dari bahan pustaka yang diupayakan dikelola secara optimal dengan melakukan peningkatan layanan perpustakaan yang baik guna mempengaruhi kepuasan pengguna layanan perpustakaan. Untuk mengetahui dan menjaga kepuasan pengguna layanan perpustakaan Sekretariat Kabinet, Pusdatin melakukan survei. Survei kepuasan pengguna layanan perpustakaan mulai dilaksanakan pada tahun 2017 karena adanya perubahan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Pusdatin Tahun 2017 dengan menambah satu indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan survei terhadap pengguna layanan perpustakaan Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi secara obyektif atas persepsi dari *stakeholder* atau pihak yang dilayani terhadap kualitas layanan yang diberikan Subbidang Perpustakaan;
- b. Mengidentifikasi unsur-unsur pelayanan Perpustakaan Sekretariat Kabinet;
- c. Mengidentifikasi harapan pengguna perpustakaan terhadap pelaksanaan pelayanan di Subbidang Perpustakaan;
- d. Mendapatkan usulan/masukan bagi seluruh pejabat dan pegawai pemberi layanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya;
- e. Hasil survei dapat menjadi data pendukung (*evidence*) dalam evaluasi pelayanan Subbidang perpustakaan.

Guna mengetahui dan menjaga kepuasan pengguna layanan perpustakaan Sekretariat Kabinet, dilakukan survei dengan menggunakan metode pengukuran kualitatif atas beberapa variabel yang terkait dengan kelengkapan koleksi buku dan terbitan berkala, kemudahan menemukan koleksi pada rak, kerapian penataan koleksi, kondisi fisik, keramahan/sikap petugas Perpustakaan yang melayani, dan kecepatan melayani.

Berdasar survei tersebut akan diketahui Tingkat kepuasan responden, dari "Tidak Puas, sampai dengan Sangat Puas", yang diperoleh dari hasil kajian melalui perhitungan berikut:

$$\text{Persentase Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S}}{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S} + \text{TS} + \text{STS}} \times 100\%$$

Dengan keterangan:

- SS : Responden yang berpendapat Sangat Setuju/Sangat Puas;
S : Responden yang berpendapat Setuju/Puas;
TS : Responden yang berpendapat Tidak Setuju/Tidak Puas;
STS : Responden yang berpendapat Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Puas.

Pada tahun 2018 telah dilakukan survei terhadap responden pengguna layanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Survei tersebut dilakukan pada kegiatan Pusdatin dalam bedah buku. Dari hasil penghitungan

Form isian survei yang terkumpul dari sejumlah 42 orang pengguna/responden yang hadir dalam kegiatan bedah buku, diperoleh data untuk penghitungan yang menggambarkan pernyataan responden “Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) terhadap keseluruhan pelayanan perpustakaan. Adapun hasil perhitungan dan analisis survei, sebagai berikut:

Hasil Penghitungan Pengguna/responden

No.	Variabel	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
1.	Kelengkapan koleksi buku dan terbitan berkala (majalah, tabloid, koran).	5	31	4	-
2.	Kemudahan menemukan koleksi pada rak.	4	32	4	-
3.	Kerapian penataan koleksi.	9	28	4	-
4.	Kondisi fisik koleksi.	7	28	4	-
5.	Keramahan/sikap petugas dalam melayani.	18	23	-	-
6.	Kecepatan melayani.	16	25	1	-
7.	Inisiatif dalam membantu pencarian koleksi.	11	24	5	-
8.	Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan.	12	24	5	-
9.	Pelayanan secara keseluruhan.	13	27	1	-
	Rata-rata	95	242	28	0

Hasil Pengukuran survei layanan terhadap 42 orang pengguna/responden dari layanan perpustakaan secara keseluruhan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S}}{\text{Jumlah Kategori SS} + \text{S} + \text{TS} + \text{STS}} \times 100\%$$

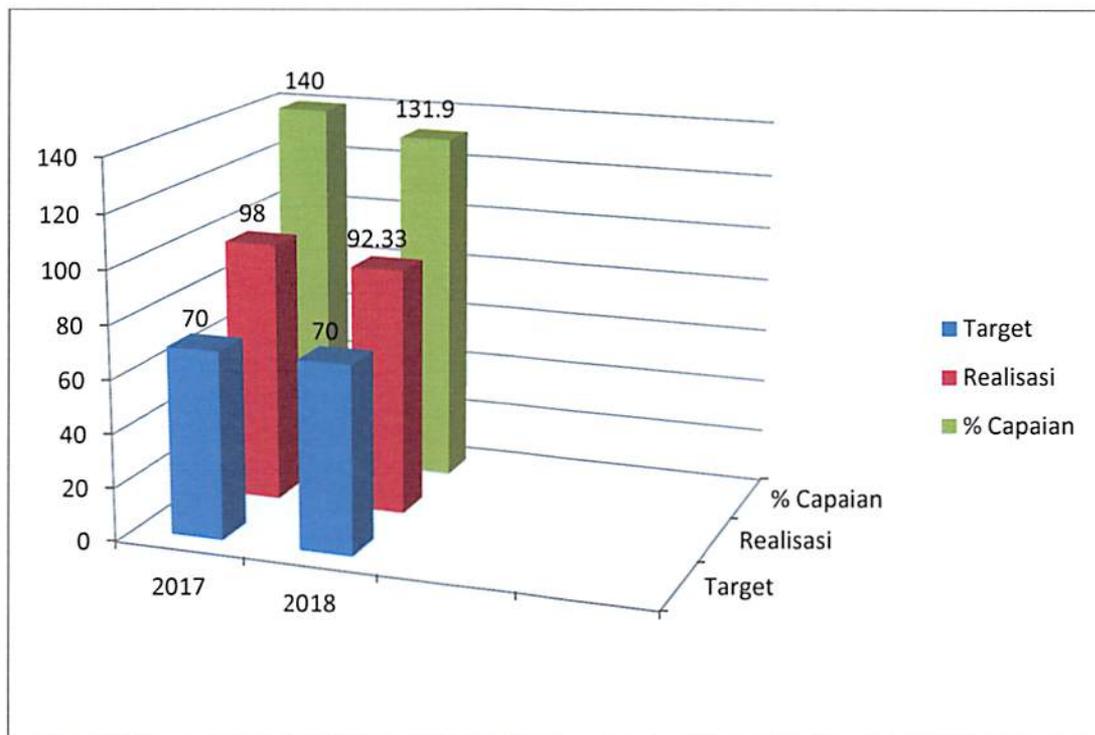
$$\begin{aligned} \text{Persentase Kepuasan} &= \frac{95 + 242}{95 + 242 + 28 + 0} \times 100\% \\ &= \underline{92,33\%} \end{aligned}$$

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Persentase Kepuasan para responden pengguna layanan perpustakaan Sekretariat Kabinet sebesar 92,33%. Nilai tertinggi terdapat pada variabel “Keramahan/sikap petugas

dalam melayani” dengan nilai 100%, tingkat kepuasan pada variabel ini sangat tinggi karena keramahan petugas dalam melayani para pengguna layanan perpustakaan, kecepatan petugas dalam melayani, petugas memiliki inisiatif dalam membantu pencarian koleksi, dan petugas menguasai koleksi bahan pustaka secara baik.

Sedangkan nilai yang terendah pada “Inisiatif dalam membantu pencarian koleksi” dan “Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan”, hal ini disebabkan karena pegawai yang membantu di Perpustakaan Sekretariat Kabinet tidak dari pendidikan perpustakaan sehingga kedepannya perlu dilaksanakan diklat pagi pegawai tersebut.

Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan tahun 2018 menurun dibanding tahun 2017. Grafik dan tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan hasil pelaksanaan survei Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan tahun 2017 dan Tahun 2018, sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	2017	70%	98%	140%
	2018	70%	92,33%	131,9%

Berdasarkan grafik dan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir, persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan capaiannya di atas target yang telah ditetapkan sebesar 70%, dengan capaian tertinggi di tahun 2017 sebesar 98%. Dibanding realisasi dan capaian tahun 2017, realisasi tahun 2018 menurun sebesar 5,67% dan capaian tahun 2018 turun sebesar 8,1%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh karena perbedaan jumlah dan kriteria pejabat dan pegawai yang menjadi responden.

Pada tahun 2017 merupakan uji coba survei internal dengan cara acak dan meminta pengunjung yang datang langsung ke perpustakaan berkenan mengisi form survei yang telah disediakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengunjung/responden yang di survei mempunyai intensitas kunjungan yang cukup, responden mengetahui dan sudah merasakan langsung layanan perpustakaan serta memiliki kebutuhan terhadap data/informasi bahan pustaka yang dilayankan di Perpustakaan Sekretariat Kabinet.

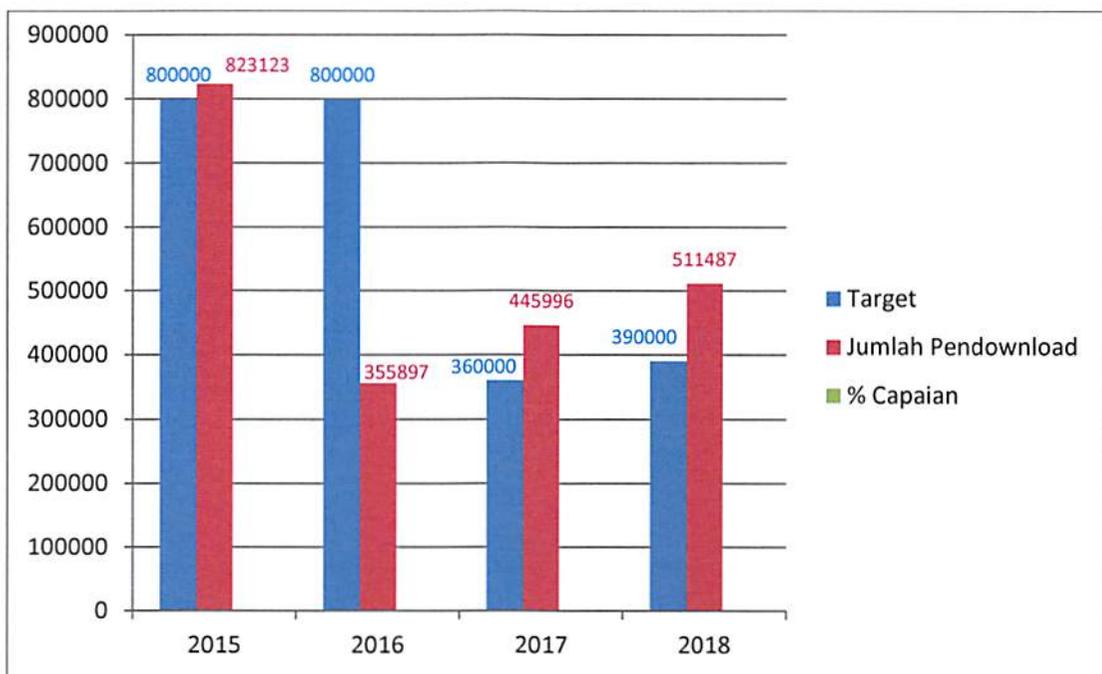
Sedangkan pada tahun 2018, survei dilaksanakan pada saat bersamaan dengan kegiatan sosialisasi bahan pustaka, sehingga responden yang mengikuti survei dimaksud lebih varian/beragam dan berdasarkan data survei menunjukkan bahwa responden di tahun ini intensitas kunjungannya kurang, sehingga responden ada yang kurang mengetahui dan belum merasakan langsung layanan perpustakaan dan dengan demikian sangat berpengaruh dengan keakuratan data serta subyektifitas pengisian variabel survei.

Namun demikian, dengan dilaksanakannya survei layanan pengguna perpustakaan selama dua tahun berturut-turut, Pusdatin berupaya meningkatkan layanan perpustakaan secara signifikan terutama dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang diperoleh dari survei. Peningkatan layanan diupayakan berbasis kebutuhan pengguna/responden,

diantaranya pada penambahan pencahayaan dan kenyamanan ruangan, pengembangan bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik, peningkatan layanan digital dan pengelolaan perpustakaan menuju perpustakaan digital.

3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada *website* Sekretariat Kabinet

Pemerintah dan sistem pelayanan publik di era *e-government* dituntut untuk transparan, efektif, efisien, akuntabel dan berguna bagi masyarakat. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh instansi pemerintah dalam melakukan fungsinya. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi membuka kesempatan dalam mengakses, mengolah dan menggunakan informasi secara cepat dan akurat, salah satunya mengoptimalkan *website* www.setkab.go.id sebagai salah satu informasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet RI yaitu produk kebijakan yang salah satunya berupa peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan jumlah pengunduh perundang-undangan dari tahun 2015 s.d. 2018, sebagai berikut:



No.	Tahun	Target	Jumlah Pen-download	Capaian
1.	2015	800.000	823.123	102,89%
2.	2016	800.000	355.897	44,49%
3.	2017	360.000	445.996	123,88%
4.	2018	390.000	544.487	139,61%

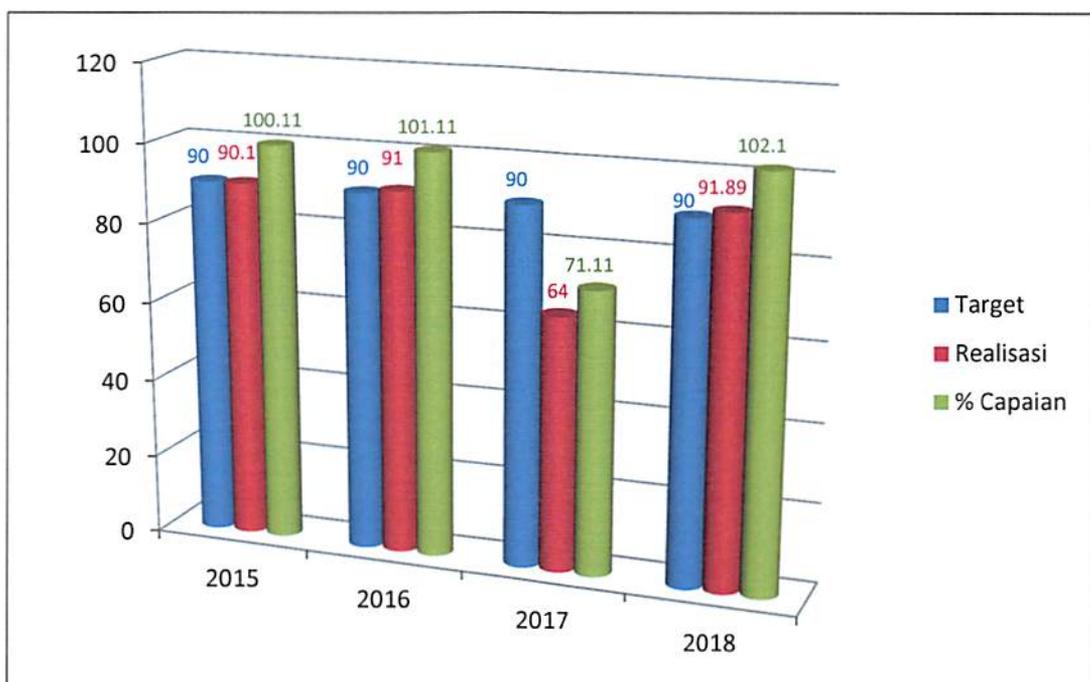
Dilihat dari *chart* di atas terdapat variasi jumlah pengunduh dari tahun ke tahun yang ditenggarai dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Pada tahun 2015 pemerintah telah menerbitkan produk kebijakan baru sebanyak 342 peraturan perundang-undangan (PUU), sehingga banyak pengguna informasi yang mengakses dan mengunduh (*download*) data peraturan perundang-undangan pada *website* www.setkab.go.id. Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan kebijakan PUU tidak sebanyak tahun sebelumnya yakni 214 PUU, sehingga jumlah pengunduh mengalami penurunan sebanyak 467.226 pengunduh. Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru berupa 268 PUU, hal ini meningkatkan jumlah pengunduh sebanyak 90.099. Namun demikian meskipun pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah PUU yang dikeluarkan Pemerintah sebanyak 255 kebijakan, namun jumlah pengunduh mengalami peningkatan menjadi 544.487. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa variasi jumlah pengunduh dari tahun ke tahun terjadi dikarenakan tidak semata dari jumlah diterbitkan PUU tetapi juga dipengaruhi oleh ketentuan/substansi PUU yang diterbitkan.

Peningkatan jumlah pengunduh PUU dalam Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU) pada tahun 2018 sebagai hasil upaya Pusdatin Sekretariat Kabinet untuk memuat PUU yang terbaru secara cepat dan akurat, sehingga pengguna layanan SIPUU yang membutuhkan PUU segera memperoleh informasi dimaksud dan mengunduh PUU yang dibutuhkan.

4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet

Terkait kebutuhan masyarakat terhadap informasi Pemerintah, Sekretariat Kabinet melalui *website* berupaya memenuhinya diantaranya dengan memuat data/informasi seputar kegiatan Presiden/Wakil Presiden baik terkait Sidang Kabinet/Rapat Terbatas maupun kegiatan-kegiatan kunjung ke daerah/lokasi tertentu. Guna mengetahui kepuasan atas pemenuhan informasi dimaksud, pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet melakukan survei, dengan realisasi 91,89% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90%.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Kabinet telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung situs. Survei ini mencakup tingkat kemanfaatan situs terhadap *website* Sekretariat Kabinet. Berikut hasil survei kepuasan pengakses *website* Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018:



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	2015	90%	90,10%	100,11%
	2016	90%	91%	101,11%
	2017	90%	64%	71,11%
	2018	90%	91,89%	102,1%

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase kepuasan pada setiap tahunnya. Hasil survei tahun 2018 menunjukkan persentase kepuasan pengakses *website* meningkat menjadi sebesar 91,89%. Target indikator persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 adalah 90%, sehingga capaiannya sebesar 102,1%% dan dinyatakan "berhasil" karena capaian indikatornya $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan. Hal ini diperoleh ditenggarai dengan pemenuhan informasi yang sesuai kebutuhan para pengguna informasi.

Selain capaian kinerja Pusdatin yang telah diperjanjikan pada PK Pusdatin Tahun 2018 sebagaimana telah dipaparkan tersebut di muka, Pusdatin juga berhasil melaksanakan beberapa capaian lainnya selaku *ex officio* dan *ad hoc* terkait dengan tugas dan fungsi Pusdatin yang perlu digambarkan pencapaiannya dengan pertimbangan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tersebut didukung oleh Sumber Daya yang ada di Pusdatin dan dapat menggambarkan peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, seperti keterbukaan informasi publik. Adapun capaian kinerja selain yang diperjanjikan dalam PK Pusdatin pada tahun 2018, sebagai berikut:

1. Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelaksana Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sekretariat Kabinet merupakan Badan Publik yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2012, yang seiring dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet Keputusan Sekretaris Kabinet dimaksud dicabut dan diganti dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet (PPID).

Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, menjadi pedoman bagi PPID Sekretariat Kabinet dalam mengemban tanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik guna mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, selain didukung dengan sarana dan prasarana juga Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensinya dan mendapatkan dukungan teknis dan administrasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol serta berkoordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: Kep.41/ADM/X/2018 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan amanat Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 tahun 2016, PPID Sekretariat Kabinet pada kurun waktu tahun 2018 telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melaksanakan:

- a. Menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang saat ini masih menunggu ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet sebagai pengganti dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet

yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet saat ini. Selain itu, Tim PID juga telah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, guna ditetapkan sebagai daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan oleh PPID.

- b. Melakukan pembahasan dan menghasilkan keputusan mengenai visi, misi, slogan (*tag line*), dan logo PPID Sekretariat Kabinet.
- c. Menindaklanjuti sebanyak 105 (seratus lima) layanan Informasi Publik melalui media telepon, email, surat, maupun yang datang langsung ke PPID Sekretariat Kabinet. Dari permohonan Informasi Publik dimaksud, sejumlah 72 (tujuh puluh dua) dikabulkan seluruhnya, sejumlah 1 (satu) dikabulkan sebagian, sejumlah 24 (dua puluh empat) permohonan yang tidak ditindaklanjuti, serta sejumlah 8 (delapan) permohonan ditolak dengan alasan informasi tidak berada dalam wewenang PPID Sekretariat Kabinet, dan permohonan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- d. Memberikan secara lengkap laporan tahunan pelaksanaan tugas PPID Tahun 2018.

Sekretariat Kabinet sebagai salah satu dari 289 Badan Publik yang berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, memperoleh kesempatan dilakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat melalui kegiatan pemaparan pelaksanaan tugas PPID yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2018 di Hotel Treva Jakarta, dengan indikator monev antara lain:

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID;
2. Pengumuman Informasi Publik agar dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;
3. Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik; dan
4. Presentasi Badan Publik terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasar pelaksanaan Money Keterbukaan Informasi Publik tersebut, pada Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden pada 5 November 2018, PPID Sekretariat Kabinet termasuk salah satu dari 53 Badan Publik yang berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik "Cukup Informatif" untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Gambar
Sertifikat Penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik



2. Pemingkatan Indeks KAMI dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Pusat, mengundang Sekretariat Kabinet pada kegiatan *Desktop Assesment* (Validasi) hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Pelaksanaan *Desktop Assesment* didahului dengan pengisian *self assessment form* terkait pengukuran kematangan indeks KAMI di lingkungan instansi pusat.

Terdapat beberapa kriteria utama yang harus dinilai mandiri oleh tiap unit Teknologi Informasi (TI) di setiap instansi dalam mengukur dan memetakan Indeks KAMI yang sudah diimplementasikan dalam memberikan pelayanan publik, diantaranya Kategori Teknologi Sistem Informasi (dengan kriteria Rendah, Tinggi, Strategis), Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, dan Pengelolaan Aset.



Obyek evaluasi indeks KAMI terhadap pelayanan publik berbeda dari tahun sebelumnya. Secara umum terdapat peningkatan hasil (score)

DesktopAssesment Indeks KAMI saat ini dibanding tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap keamanan informasi Sekretariat Kabinet mendapat skor 229.

3. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan SPBE berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan yang dapat mendukung upaya perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan SPBE melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan menggunakan metode evaluasi mandiri (internal) dan evaluasi eksternal.

Metode evaluasi mandiri, dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal dari K/L/I bersangkutan, berunsurkan Pejabat/Pegawai yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi, diantaranya proses bisnis pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan kinerja, dan penganggaran. Dalam persiapan pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan pembahasan bersama unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan berdasarkan hal tersebut, dibentuk Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet Tahun 2018 melalui Keputusan Deputy Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 28 Tahun 2018. Dengan diketuai oleh Kepala Pusdatin, Tim bertugas melakukan Evaluasi Mandiri SPBE Sekretariat Kabinet.

Berdasar hasil evaluasi mandiri SPBE Sekretariat Kabinet, dilakukan evaluasi eksternal (evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan) oleh Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB berkerja sama dengan 5 (lima) perguruan tinggi yaitu: Universitas Indonesia, Politeknik Elektronika Surabaya, Universitas Telkom, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Gunadarma, yang pelaksanaannya melalui 3 (tiga) tahapan berikut:

- a. Tahap Sosialisasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018;

- b. Tahap Evaluasi Mandiri, dimulai sejak 20 Maret s.d. 14 Mei 2018 di Sekretariat Kabinet dan Dokumen Evaluasi telah diunggah pada tanggal 14 Mei 2018;
- c. Tahap Wawancara, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 yang dihadiri oleh Ketua Tim Evaluator beserta tim.

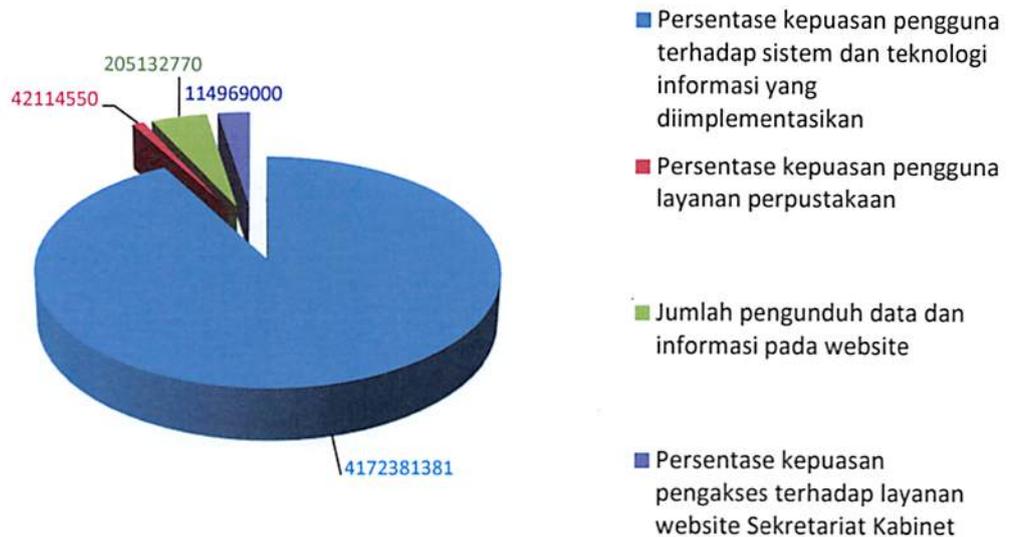
Pelaksanaan tahap Evaluasi SPBE tersebut di atas sudah selesai, namun pada saat penyusunan laporan ini Sekretariat Kabinet belum menerima hasil akhir dari penilaian Evaluasi SPBE tersebut.

C. Realisasi Anggaran

Berdasar pagu anggaran yang diperoleh tahun 2018, yaitu sebesar Rp.5.035.020.000,-(Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), Pusdatin telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.4.534.597.701,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 90,06%., sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Sasaran Strategis		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan)			
Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	5.035.020.000	4.534.597.701	90,06

Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Indikator



Uraian lebih lanjut realisasi anggaran Pusdatin berdasarkan *chart* di atas sesuai rincian Indikator kinerja, sebagai berikut:

- a. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan, sebesar Rp. 4.172.381.381,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Pada Tahun 2018 Pusdatin telah merencanakan anggaran sebesar Rp.4.469.293.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk mendukung terpenuhinya indikator kinerja "Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan". Anggaran ini terserap sebesar **93,36%** atau sebesar Rp.4.172.381.381,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang digunakan untuk pembangunan/pengembangan dan pengadaan Sistem Informasi (SI) Situs Instansi Pembina Jabatan Fungsional, SI Penggajian Pegawai, pengadaan *Zimbra Collaboration Suite*, *Zimbra Renewal License dan Maintenance*. Selanjutnya, guna mewujudkan kelancaran pembangunan/pengembangan dan penerapan SI, pada Tahun 2018 Pusdatin melaksanakan pengadaan barang pendukung pusat data seperti *Access Point*, *server*, *switch*,

perpanjangan sewa *virtual private network (vpn)*, *virtual private server (vps)*, pengadaan perlengkapan jaringan, SSL VPN, *hardware warranty support Cisco ASA*. Selain itu, Pusdatin juga melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penerapan SI, diantaranya melalui pembinaan teknologi dan sistem informasi.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, target indikator kinerja “Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan” pada tahun 2018 telah tercapai bahkan melebihi target, dengan realisasi anggaran sebesar **93,36%** dari yang telah direncanakan. Penghematan tersebut diperoleh dari adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran berupa belanja modal pengadaan barang pendukung pusat data sebesar Rp. 166.661.496,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yakni selisih antara anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.506.020.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Ribuan Juta Dua Puluh Ribuan Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.339.358.504,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribuan Lima Ratus Empat Rupiah).

- b. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan sebesar Rp.42.114.550,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribuan Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

Pusdatin pada tahun 2018 telah merencanakan anggaran sebesar Rp.129.890.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah) untuk mendukung tercapainya target indikator “Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan”. Anggaran ini terserap sebesar Rp.42.114.550,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Belas Ribuan Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau **32,42%** dari anggaran yang direncanakan. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pengelolaan Perpustakaan seperti pengadaan surat kabar dan majalah, dan penyelenggaraan perpustakaan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Pegawai dalam melakukan analisis untuk pemberian rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Pada Tahun 2018, untuk pengadaan surat kabar dan majalah dapat dilakukan setiap bulan sesuai yang direncanakan. Sedangkan untuk pengadaan buku tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan, karena adanya kebijakan baru bahwa pengadaan buku tidak melalui penyedia melainkan dengan cara membeli langsung ke toko buku. Dalam pelaksanaannya, pembelian tidak dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, karena buku yang dibutuhkan tidak tersedia dan harus memesan terlebih dahulu yang memerlukan waktu lama sampai berakhirnya tahun anggaran 2018. Dengan demikian, sesuai hasil koordinasi dengan unit kerja yang menangani pengadaan buku tersebut (Biro Umum), Pusdatin akan mengajukan kembali permintaan buku-buku tersebut pada Tahun 2019.

Target dari indikator kinerja “Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan” pada tahun 2018 sudah tercapai bahkan melebihi target, walaupun dengan anggaran sebesar 32,42% dari yang telah direncanakan. Namun demikian, Pusdatin akan meningkatkan pelayanan Perpustakaan dengan pengadaan buku-buku baik cetak maupun *e-book* yang dapat mendukung pelaksanaan analisis dalam pemberian rekomendasi.

- c. Jumlah pengunduh data dan informasi pada *website* sebesar Rp.205.132.770,- (Dua Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Guna mendukung tercapainya target indikator “Jumlah pengunduh data dan informasi pada *website*”, Pusdatin melaksanakan program dan kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar Rp.205.132.770,- (Dua Ratus Lima Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 68,79% dari anggaran yang direncanakan tahun 2018 sebesar Rp. 298.191.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan Informasi lainnya.

Adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan seminar/bimtek/*workshop* dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyebarluasan data dan informasi

penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan Informasi lainnya yang direncanakan sebesar Rp. 214.511.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah), namun mempertimbangkan kembali untuk jumlah peserta dan materi substansi yang relevan yang harus diikuti maka kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan anggaran sebesar Rp. 199.674.600,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah). Dari gambaran salah satu program dan kegiatan ini berarti adanya efisiensi/penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

- d. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet sebesar Rp.114.969.000,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pada Tahun 2018 Pusdatin telah merencanakan anggaran sebesar Rp.137.646.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk mendukung tercapainya indikator kinerja "Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan *website* Sekretariat Kabinet", namun dalam pelaksanaannya terserap sebesar 83,52% atau sebesar Rp. 114.969.000,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian serta data dan Informasi lainnya.

Berdasar realisasi anggaran tersebut, menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran yang diperoleh dari kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan data dan informasi. Awalnya perjalanan dinas dianggarkan atau ditargetkan sebesar Rp. 125.554.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), namun mempertimbangkan pengurangan jumlah peserta dengan tetap memperhatikan keterwakilan dan substansi penyelenggaraan maka realisasi anggaran menjadi sebesar Rp. 114.969.000,- (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dari uraian di muka, Pusdatin dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, telah berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kebijakan yang ada, seperti pengadaan buku yang harus membeli langsung ke toko buku bukan melalui penyedia. Selain itu, optimalisasi anggaran yang mendukung efisiensi atau penghematan anggaran dilakukan Pusdatin, diantaranya dalam kegiatan, seperti penentuan Pejabat/Pegawai sebagai peserta untuk perjalanan dinas dalam mengikuti *workshop/seminar/benchmarking* diatur sesuai keterwakilan dan relevansi materi/substansi kegiatan yang akan diikuti. Bertolak dari gambaran yang ada, prinsip efisiensi atau penghematan anggaran patut untuk dikedepankan namun demikian dengan tetap mempertimbangkan efektifitas program dan kegiatan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Laporan Kinerja Pusdatin) Tahun 2018 menyajikan informasi keberhasilan capaian strategis Pusdatin untuk Tahun 2018 yang diukur berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya mencapai target dan bahkan lebih dari 100%, yakni memperoleh capaian sebesar 120,49%, masuk dalam kategori "**Sangat Baik**". Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Pusdatin yang telah diperjanjikan di awal tahun.

Capaian sasaran "Terwujudnya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas" dinyatakan "**Berhasil**" dicapai, karena didukung oleh adanya faktor utama keberhasilan tersebut, antara lain komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran Pusdatin dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdatin, dan koordinasi antar unit kerja yang semakin kondusif.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, Pusdatin mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga tercapai efisiensi atau penghematan anggaran, yakni dengan realisasi sebesar 90,06%. Optimalisasi anggaran, diantaranya dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada, dan penentuan kegiatan yang memperhatikan prinsip keterwakilan dan relevan dengan tugas dan fungsi.

Penyempurnaan akan terus dilakukan Pusdatin secara berkelanjutan, antara lain melalui tindak lanjut atas saran dan masukan baik dari hasil monitoring dan evaluasi internal yang tergambar dari hasil survei tiap indikator sebagaimana tertuang dalam Laporan kinerja ini maupun dari hasil monitoring eksternal dari unit kerja pengawasan Sekretariat Kabinet. Penyempurnaan dan peningkatan kinerja terus dilakukan dengan berpedoman pada langkah strategis yang direncanakan terkait dengan pemeliharaan, perawatan, pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi yang memadai, dan perangkat lunak; dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna peningkatan layanan sistem dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dalam penerapan *e-government* di Sekretariat Kabinet, dan pengembangan layanan kearsipan dan perpustakaan, serta data dan informasi

yang dikelola Pusdatin memberikan manfaat bagi organisasi, *stakeholders*, maupun masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengoptimalkan anggaran yang tersedia yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. Dengan pelaksanaan seperti tersebut pada gilirannya, Pusdatin dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.





LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018

Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018

Lampiran 3. Penyerapan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018

Lampiran 4. Kuesioner Survei Kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan

Lampiran 5. Kuesioner Survei Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIC INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanto, S.Kom.
 Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anang Wibowo, M.M.
 Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
 selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


 Dr. Ir. Pramono Anang Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
 Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi


 Suwanto, S.Kom.

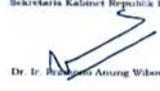
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Keasipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80 Persen
		Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70 Persen
		Jumlah pengaduan data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet	300.000 Pengaduan
		Persentase kepuasan pengguna terhadap layanan website Sekretariat Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Keasipan, dan Perpustakaan	
1. Pembangunan/ pengembangan infrastruktur dan jaringan	Rp. 5.427.800.000,-
2. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan	Rp. 1.672.501.000,-
3. Pembangunan/ pengembangan dan penerapan teknologi dan sistem informasi	Rp. 725.672.000,-
4. Pengumpulan dan pengolahan data	Rp. 226.245.000,-
5. Pengelolaan arsip dan dokumentasi	Rp. 209.592.000,-
6. Pengelolaan perpustakaan	Rp. 129.890.000,-
Total Anggaran	Rp. 8.391.700.000,-

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


 Dr. Ir. Pramono Anang Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
 Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi


 Suwanto, S.Kom.

Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018

Sasaran		Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan)		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase kepuasan penggunaan terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80%	86,67%	108,34%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setkab	Rp.5.035.020.000	Rp.4.534.597.701	90,06%
		Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70%	92,33%	131,9%				
		Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i> Sekreteriat Kabinet	390.000 pengunduh	544.487 pengunduh	139,61%				
		Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	90%	91,89%	102,1%				

Lampiran 3. Penyerapan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Persen Penyerapan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	Renstra Pusdatin 2015-2019 (Penyempurnaan)				
Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Terwujudnya Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	1. Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	Rp.4.469.293.000,-	Rp.4.172.381.381,-	93,36%
		2. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	Rp.129.890.000,-	Rp.42.114.550,-	32,42%
		3. Jumlah pengunduh data dan informasi pada <i>website</i>	Rp.298.191.000,-	Rp.205.132.770,-	68,79%
		4. Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan <i>website</i> Sekretariat Kabinet	Rp.137.646.000,-	Rp.114.969.000,-	83,52%

Lampiran 4. Kuesioner Survei Kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan

SURVEI

Kepuasan Pengguna Terhadap Sistem dan Teknologi Informasi yang Diimplementasikan

Dalam rangka peningkatan layanan dukungan sistem dan teknologi informasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di lingkungan Sekretariat Kabinet, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam survei kami melalui pengisian kuisisioner yang terkait dengan kepuasan pengguna sistem dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Besar harapan kami agar penilaian objektif Bapak/Ibu pada Kuisisioner ini dapat menjadi bahan masukan guna meningkatkan efektivitas layanan dan kinerja Pusdatin.

A. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda \surd pada kolom PENGGUNAAN untuk Tabel I (Sistem dan Teknologi Informasi yang Diimplementasikan), sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kosongkan jika Bapak/Ibu belum pernah menggunakan aplikasi sama sekali. Isi kolom PERNAH jika Bapak/Ibu menggunakan aplikasi setidaknya 1 (satu) kali.
2. Berilah tanda \surd pada kolom PENILAIAN untuk Tabel II (Penilaian Pengguna Sistem dan Teknologi Informasi), sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu terhadap pernyataan mengenai aplikasi-aplikasi yang paling sering Bapak/Ibu gunakan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3. Jika unit kerja Bapak/Ibu melakukan permohonan pembangunan/pengembangan sistem informasi kepada Pusdatin, silakan lanjutkan dengan mengisi huruf **D. Survei Kepuasan Pemohon**. Jika **tidak**, silakan **lewati** dan lanjutkan mengisi huruf **E. Feedback**.
4. Berilah saran pada Tabel IV (Saran dan Masukan Pengguna), untuk penilaian Bapak/Ibu terhadap aplikasi ataupun terhadap Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) agar dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi maupun kinerja Pusdatin.

B. Data Responden

1. Tanggal Pengisian :

2. Usia (Jenis Kelamin) : Tahun (L / P) *lingkari salah satu

3. Unit Kerja :
4. Jabatan : () Eselon II () Eselon III () Eselon IV
() Staf
5. Pendidikan Terakhir : () SMA () Strata 1 () Strata 2 () Strata 3
(Beri tanda \checkmark pada pilihan Jabatan dan Pendidikan Terakhir)

C. Survei Kepuasan Pengguna

Tabel I. Sistem dan Teknologi Informasi yang Diimplementasikan

NO	APLIKASI	PENGUNAAN	
		PERNAH	SERING
1	Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)		
2	Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT)		
3	Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPERJADIN)		
4	Sistem Informasi Keuangan (SISKA)		
5	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) <i>Online</i>		
6	Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)		
7	Website Sekretariat Kabinet (setkab.go.id)		
8	Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPPU)		
9	Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB)		
10	<i>E-mail</i> Sekretariat Kabinet		

Tabel II. Penilaian Pengguna Sistem dan Teknologi Informasi

NO	PERNYATAAN	PENILAIAN			
		STS	TS	S	SS
<i>User Experience</i>					
1	Aplikasi mudah dipelajari				
2	Aplikasi mudah diakses				
3	Aplikasi mudah digunakan				
4	Aplikasi memiliki tampilan yang tidak membingungkan				
5	Aplikasi berjalan dengan lancar				
Keamanan Aplikasi					
6	Aplikasi memiliki hak akses (tingkatan akun, <i>username</i> , dan <i>password</i>)				
7	Aplikasi menyediakan fitur perubahan <i>password</i>				
8	Aplikasi aman dari gangguan (virus dan <i>malware</i>)				
Data dan Informasi					
9	Aplikasi menghasilkan data dan informasi yang utuh dan akurat (sesuai dengan data yang dimasukkan)				

10	Aplikasi menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan				
11	Aplikasi menyediakan data dan informasi secara tepat waktu				
12	Aplikasi memiliki dukungan layanan bantuan (<i>helpdesk</i>) yang responsif				
13	Aplikasi sangat bermanfaat				
14	Aplikasi membantu dalam melakukan pekerjaan				

D. Survei Kepuasan Pemohon

Tabel III hanya diisi apabila unit kerja Bapak/Ibu melakukan ataupun mengkoordinasikan permohonan pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepada Pusdatin melalui memorandum ataupun dengan memberikan Kerangka Acuan Kerja, yaitu:

NO	APLIKASI	UNIT KERJA PEMOHON	(√)
1	Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT)	Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
2	Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT)		
3	Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
		Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	
4	Website Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)	Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	

Berilah tanda pada kolom (√) sebagai penanda unit kerja Bapak/Ibu

Tabel III. Penilaian Pemohon Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

NO	PERNYATAAN	PENILAIAN			
		STS	TS	S	SS
1	Pengembang memfasilitasi pertemuan/rapat pembahasan awal sebelum mulai membangun aplikasi				
2	Pengembang meminta Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada pemohon sebagai dasar pembangunan aplikasi				
3	Pengembang melakukan review terhadap KAK yang diajukan pemohon				
4	Pengembang dapat memahami proses bisnis yang dibutuhkan pemohon				
5	Pengembang dapat menerjemahkan kebutuhan pemohon ke dalam rancangan atau desain aplikasi				
6	Pengembang memiliki kompetensi yang cukup untuk membangun aplikasi yang dimohonkan				

Lampiran 5. Kuesioner Survei Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI SUB BIDANG PERPUSTAKAAN	KUESIONER SURVEY KEPUASAN PELANGGAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA					
<i>Untuk meningkatkan kualitas layanan dan koleksi Perpustakaan Sekretariat Kabinet RI kami sangat berterima kasih apabila Bapak/Ibu/Sdr.i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Survey Kepuasan Pelanggan Perpustakaan dan memberikan saran pada tempat yang disediakan.</i>						
Nama : Unit Kerja : Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr.i mengunjungi Perpustakaan dalam sebulan? <input type="checkbox"/> < 5 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> > 10 (kali)						
<i>Mohon berikan tanda ceklist (V) pada satu dari pilihan jawaban yang tersedia</i>						
A. PENILAIAN TERHADAP KOLEKSI PERPUSTAKAAN :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Sangat Puas</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Puas</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Kurang Puas</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">Tidak Puas</td> </tr> </table>		Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas		
1. Kelengkapan koleksi buku dan terbitan berkala (majalah, tabloid, koran)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Kemudahan menemukan koleksi yang terdapat pada rak	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Kerapian penataan koleksi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Kondisi fisik koleksi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
B. PENILAIAN TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PERPUSTAKAAN :						
1. Keramahan / sikap petugas dalam melayani	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Kecepatan melayani	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. Inisiatif dalam membantu pencarian koleksi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Pelayanan secara keseluruhan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C. M A S U K A N UNTUK MENAMBAH KOLEKSI PERPUSTAKAAN :						
1. a Judul Koleksi : b Nama Pengarang : c Nama Penerbit : d Tahun Terbit :						
2. a Judul Koleksi : b Nama Pengarang : c Nama Penerbit : d Tahun Terbit :						
D. SARAN DAN REKOMENDASI :						
Saran :						
Rekomendasi :						
Paraf : _____ Tanggal : _____						
<i>Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr.i, semoga hasil kuesioner ini dapat menjadi anjuran yang berguna demi peningkatan kinerja Perpustakaan Sekretariat Kabinet RI</i>						